

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, **Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021** ini dapat berjalan dengan baik dan telah selesai di susun.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan berkelanjutan agar berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang telah dan sedang dilaksanakan menjadi hal yang mutlak dan penting untuk dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja dan dapat menjadi umpan balik perencanaan penanggulangan kemiskinan pada tahun berikutnya

Melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK Daerah ini berfungsi sebagai mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh TNP2K. Hasil pelaksanaan tugas tersebut masing-masing dilaporkan oleh TKPK Provinsi kepada Gubernur dan TNP2K dan oleh TKPK Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami TKPK Provinsi NTT menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi NTT Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi NTT Tahun 2021.

Akhirnya, semoga Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya serta secara khusus berguna bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya merealisasikan percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTT guna mewujudkan NTT Bangkit- NTT Sejahtera.

Kupang, Desember 2022
Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT

Dr. Ir Alfonsus Theodorus, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197401191999031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan Dokumen.....	8
BAB II KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	9
2.1 Anggaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan	9
2.2 Hambatan dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan	9
2.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	10
2.4 Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Untuk Penanggulangan Kemiskinan	11
BAB III CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN	13
3.1 Program Penanggulang an Kemiskinan.....	13
3.1.1 Pemerintah Provinsi NTT	13
3.1.2 Kementerian/ Lembaga	24
3.2 Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan	28
3.3 Capaian Kinerja Tahunan	38
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	54
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 KESIMPULAN	61
5.2 REKOMENDASI	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan saat ini telah menjadi salah satu isu global karena masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah yang di hadapi oleh berbagai negara di dunia. Bank Dunia baru saja merilis laporan terkait perkembangan pengentasan kemiskinan dunia dimana dalam laporan tersebut menguraikan bahwa pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia telah membuat kemunduran terbesar dalam upaya pengurangan kemiskinan secara global (World Bank, 2022). Dengan melihat bahwa persoalan kemiskinan telah menjadi masalah yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia maka permasalahan kemiskinan telah menjadi agenda utama dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan menjadi tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs yaitu “Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di Mana Pun” (*End poverty in all its forms everywhere*).

Diskusi terkait kemiskinan di dunia saat ini telah ditempatkan dalam kerangka multidimensional dimana kemiskinan tidak hanya di pandang dari indikator ekonomi (pendapatan) saja tetapi telah diperluas dengan memasukkan indikator lainnya seperti sosial dan budaya (pendidikan dan kesehatan). Sejalan dengan hal tersebut diatas, Indonesia di dalam RPJPN 2005-2025 juga telah menempatkan masalah kemiskinan dalam kerangka multidimensional dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensional ini membuat pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi untuk penanganan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui upaya untuk menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) yang dilakukan untuk mencapai sasaran (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (iii) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Kemudian strategi-strategi tersebut dijabarkan dalam berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan

mulai dari penyediaan kebutuhan pangan, penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, perluasan kesempatan kerja, pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, bantuan modal usaha melalui dana bergulir, dan berbagai upaya pendampingan bagi masyarakat miskin.

Berbagai Kebijakan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 kemudian di jabarkan pelaksanaannya dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi 1 digit yaitu tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5%-7%. Sejalan dengan isu strategis terkait kemiskinan secara nasional, isu terkait kemiskinan juga menjadi salah satu isu strategis dalam RPJP Provinsi NTT 2005-2025. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, dimana isu kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera di tangani oleh Pemerintah Provinsi NTT karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Provinsi NTT menempati urutan ke 3 sebagai Provinsi dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi setelah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh Provinsi NTT adalah terkait ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya antara lain adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, ketidakmampuan untuk mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, perumahan yang tidak layak huni, masalah pemenuhan air minum, listrik dan sanitasi. Dengan melihat permasalahan kemiskinan yang kompleks dan lintas sektoral tersebut maka upaya penurunan angka kemiskinan juga membutuhkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yaitu antara Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta,kelembagaan sosial kemasyarakatan dan lembaga keagamaan.

Dalam rangka meningkatkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan kemiskinan di daerah maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2020 yang mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah.TKPK ini berfungsi sebagai mitra kerja TNP2K yang bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, salah satu agenda tahunan TKPK Daerah adalah menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD). Maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tersebut maka TKPK Provinsi NTT berkewajiban untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi NTT untuk tahun 2022. Laporan ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelaras Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018–2023;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.39 Tahun 2016 Tentang Strategi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi NTT Tahun 2016-2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

- a) Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah :
 - ❖ Sebagai laporan terhadap kinerja penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT tahun 2021.
 - ❖ Sebagai bahan evaluasi dan masukkan dalam rangka perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT untuk tahun-tahun yang akan datang.
- b) Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah :
 - ❖ Untuk memberikan gambaran terkait perkembangan pelaksanaan dan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT tahun 2021.
 - ❖ Untuk memberikan gambaran tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT untuk tahun 2021.
 - ❖ Untuk memberikan rekomendasi serta saran dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT.

1.4 Sistematika Penulisan Dokumen

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) **Bab I Pendahuluan.** Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan laporan ini.
- 2) **Bab II Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan.** Pada bagian ini menguraikan tentang anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, hambatan dan tantangan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, penanganan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk penanggulangan kemiskinan.
- 3) **Bab III Capaian dan Analisis.** Pada bab ini menguraikan tentang program penanggulangan kemiskinan dan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan.
- 4) **Bab IV Rencana Tindak Lanjut.** Pada bagian ini diisi dengan informasi dan penjelasan rencana tindak lanjut yang dilakukan. Rencana tindak lanjut ini dapat dirumuskan berdasar Perangkat Daerah pelaksana program atau berdasarkan isu-isu program-program tertentu agar adanya perbaikan di tahun yang akan datang.
- 5) **Bab V Penutup.** Pada bagian penutup ini berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan merupakan rekomendasi atas seluruh temuan baik isu kebijakan, isu kelembagaan, isu pelaksanaan, maupun hasil monitoring dan evaluasi.

BAB II

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1 Anggaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 sebesar Rp. 2.454.791.965.423 anggaran tersebut melalui intervensi melalui bidang-bidang yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

No	Urusan	Alokasi Belanja Pro Poor (Rp)
1	Pendidikan	1.990.192.996.459
2	Kesehatan	127.182.906.859
3	Sosial	2.015.000.000
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	36.578.322.110
5	Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.833.739.995
6	Kelautan dan Perikanan	4.777.600.000
7	Koperasi, Tenaga Kerja	268.706.400.000
8	Transmigrasi	129.800.000
9	Energi dan Sumber Daya Mineral	375.200.000
Total		2.454.791.965.423

Sumber: DPPA 2021

2.2 Hambatan dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan

Hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Data kemiskinan belum valid yang menyebabkan tidak tepat sasaran pemberian bantuan;
2. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan usaha yang berhenti sehingga lapangan kerja dan akses sumber pendapatan bagi masyarakat miskin tertutup;
3. Belum optimalnya peran TIM Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK);
4. Belum adanya Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah dalam Penanganan Kemiskinan karena masih adanya ego sektoral.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat .

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan belum memiliki konsep yang tepat sehingga upaya tersebut belum tercapai.

2. Pola pikir dan mental miskin masyarakat.

Sebagian kecil masyarakat provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya kalangan warga yang tidak mampu, cenderung mempunyai pola pikir dan mental miskin, sehingga kurang produktif, kurang tekun, kurang serius bekerja, tidak memiliki keberanian untuk memulai usaha dan mengharapkan bantuan Pemerintah;

3. Pandemi Covid -19, Kondisi ini rentan bertambahnya penduduk miskin karena lapangan pekerjaan terbatas, pendapatan turun drastis, dan lapangan usaha tidak mudah diakses;

4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diperbaharui secara periodik dengan rentang periode waktu tertentu, atau DTKSnya terus terupdate agar didapatkan data yang valid sehingga pemberian bantuan tepat sasaran.

5. Kurang optimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK).

2.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan Pengaduan Masyarakat dibentuk sebagai wadah untuk menampung aspirasi, kepedulian dan pengaduan atas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan. Penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui tingkat desa hingga kabupaten, namun sampai dengan saat ini Tim penanggulangan kemiskinan yang sudah terbentuk hanya berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten tetapi untuk Desa/Kelurahan belum terbentuk hingga saat ini.

2.4 Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Monitoring dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Masyarakat miskin. Sedangkan kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk memberikan penilaian program, kegiatan, dan kebijakan yang telah disepakati.

Prinsip – prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan adalah :

1. Obyektif dan Profesional;
2. Transparan;
3. Partisipatif;
4. Akuntabel;
5. Tepat Waktu;
6. Berkesinambungan;
7. Berbasis Indikator Kinerja;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh TKPK Provinsi NTT terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut :

1. Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen – dokumen Perencanaan
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah.
 - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait dengan program Penanggulangan Kemiskinan
 - d. Pada tahap ini, TKPK Provinsi NTT dan Perangkat Daerah akan mengevaluasi dan mensinkronisasi dokumen perencanaan untuk memastikan bahwa program – program kemiskinan yang tercantum pada Rencana Aksi Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur terakomodir dalam dokumen perencanaan Pembangunan.

2. Monitoring dan Evaluasi Program Kemiskinan

Dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan program yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan dengan memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya yang dilakukan secara rutin/berkala sesuai kebutuhan (tematik).
 - b. Kegiatan monitoring dilakukansetiap bulan dan evaluasi dilakukan setiap triwulan untuk melihat efektifitas pelaksanaan program.
 - c. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Ketua TKPK Provinsi NTT.
3. Tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu untuk perbaikan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program percepatan.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan
3.1.1 Pemerintah Provinsi NTT

Kebijakan penanggulangan kemiskinan ini merupakan bagian dari perencanaan pemerintah Provinsi NTT yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023 khususnya pada Misi I “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil”. Yang kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan serta alokasi anggaran baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Di tingkat pemerintah daerah provinsi, berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui 09 (sembilan) urusan pemerintah daerah seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT
Tahun 2021

No	Urusan	Alokasi Belanja Pro Poor (Rp)
1	Pendidikan	1.990.192.996.459
2	Kesehatan	127.182.906.859
3	Sosial	2.015.000.000
4	PMD	36.578.322.110
5	Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.833.739.995
6	Kelautan dan Perikanan	4.777.600.000
7	Koperasi, Tenaga Kerja	268.706.400.000
8	Transmigrasi	129.800.000
9	Energi dan Sumber Daya Mineral	375.200.000
Total		2.454.791.965.423

Sumber: DPPA TA 2021

Provinsi Nusa Tenggara Timur menganggarkan program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan melalui 09 (sembilan) urusan pemerintah, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.454.791.965.423 pada Tahun 2021. Selanjutnya program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan dari masing-masing Urusan dirincikan sebagai berikut.

1. Urusan Pendidikan

Dukungan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTT yang dianggarkan melalui DPPA pada urusan Bidang Pendidikan. urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang sangat vital dalam upaya pengentasan penduduk miskin di NTT. bila melihat pada data bahwa sebagian masyarakat miskin di NTT memiliki derajat pendidikan yang rendah, intervensi pada bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas daerah dalam upayanya mengentaskan penduduk miskin yang ada di daerah ini melalui dua aras : pertama: upaya pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga miskin dalam mengakses pendidikan dengan menjamin akses pendidikan gratis pada tingkatan menengah atas. ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah. kedua: menyediakan pendidikan kejuruan (vocational) yang lebih berorientasi kepada pendidikan peserta didik agar siap memasuki pasar kerja selepas sekolah.

untuk 2021 sebesar Rp. 1.990.192.996.459,- yang dialokasikan untuk Program Pengelolaan Pendidikan. Secara rinci alokasi per kegiatan dapat dilihat pada table 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Program Kegiatan Urusan Pendidikan

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp)
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penambahan Ruang Kelas Baru, Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	537.542.585.069

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi (Rp)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	311.202.709.728
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus serta SD dan SMP, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1.141.447.701.662

Sumber: DPPA TA 2021

Program Pengelolaan Pendidikan terfokus kepada 3 (tiga) kegiatan besar sesuai dengan kewenangan provinsi yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 537.542.585.069, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 311.202.709.728, dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.141.447.701.662,-.

2. Urusan Kesehatan

salah satu pendorong kemiskinan yang tinggi di NTT adalah derajat kesehatan masyarakatnya yang masih rendah relatif terhadap wilayah lain di Indonesia. data mengenai indeks pembangunan manusia, dimana dimensi kesehatan merupakan salah satu dimensi kuncinya, menunjukkan fakta tersebut. hubungan kemiskinan dan kesehatan salah satunya terkait dengan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. oleh karena itu upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan

yang gratis dan berkualitas memiliki kontribusi yang besar terhadap upaya pengentasan penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur.

Dukungan Penanggulangan Kemiskinan pada urusan Kesehatan terdapat pada 2 (dua) Program yaitu Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan dan Program peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dengan total anggaran pada DPPA TA. 2021 adalah sebesar Rp. 127.182.906.859.

Tabel 3.2
Program Kegiatan Urusan Kesehatan

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi
Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Pengadaan PMT Bumil KEK)	Terlaksananya makanan tambahan Bumil KEK	10.671.885.000
	penyelidikan epidemiologi 125 malaria	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi 125 malaria	210.000.000
	Pengadaan Logistik DBD	Terlaksananya Logistik DBD	50.050.000
	Biaya pemeriksaan viral load, terutama untuk ODHA yang telah mendapat ART selama 12 bulan pengobatan untuk 440 odha @450.00	Biaya pemeriksaan viral load, terutama untuk ODHA yang telah mendapat ART selama 12 bulan pengobatan untuk 440 odha @450.00	243.450.000
	Pengadaan Makanan Tambahan Balita Kurus	terlaksananya Pengadaan makanan tambahan balita kurus	5.045.760.000
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3	Terlaksananya iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3	108.455.810.589
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Honor PTT Puskesmas, UPT, RS Jiwa Naimata dan RS Undana	Terlaksananya honor PTT Puskesmas, UPT, RS Jiwa Naimata dan RS Undana	2.505.951.270

Sumber: DPPA TA 2021

Pada Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan terdapat 6 (enam) kegiatan dimana kegiatan dengan dana terbesar ada pada Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Terlaksananya makanan tambahan Bumil KEK sebesar Rp. 10.671.885.000 , Pengadaan Makanan Tambahan Balita Kurus sebesar Rp. 5.045.760.000 dan Iuran jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp. 108.455.810.589. Sedangkan Program Peningkatan Kapasitas

SDM Kesehatan lebih diutamakan untuk pendukung operasional yaitu Kegiatan Honor PTT Puskesmas, UPT, RS Jiwa Naimata dan RS Undana sebesar Rp. 2.505.951.270.

3. Urusan Sosial

Urusan sosial merupakan urusan yang bersentuhan langsung dan paling dekat dengan upaya pengentasan penduduk miskin yang ada di NTT. data terkait kemiskinan dan program bantuan-bantuan sosial pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan jaring pengaman sosial untuk melindungi kelompok miskin dan rentan dilaksanakan dalam urusan ini.

Pada urusan Sosial terdapat Program Pelayanan Sosial dengan kegiatan yang berfokus pada Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan jumlah dana sebesar Rp. 2. 015.000.000, dengan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Tabel 3.3
Program Kegiatan Urusan Sosial

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi
Program Pelayanan Sosial	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga KAT memperoleh Pemberdayaan	2.015.000.000
		Jumlah Lokasi KAT yang memperoleh bantuan sarana Prasarana lingkungan sosial	

Sumber: DPPA TA 2021

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kemiskinan yang terjadi di wilayah perdesaan adalah kecenderungan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. data menunjukkan bahwa konsentrasi kantong-kantong kemiskinan di NTT teletak pada wilayah-wilayah perdesaan yang tersebar di berbagai Kabupaten di NTT. salah satu pemicu kemiskinan di perdesaan adalah belum terbangun dan terberdayakannya lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. oleh karena sebab itulah upaya penanggulangan kemiskinan juga dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyarakat desa. Dukungan penanggulangan kemiskinan dari Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ada pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi dana sebesar Rp. 36.578.322.110.

Tabel 3.4
Program Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas	36.578.322.110

Sumber: DPPA TA 2021

5. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sektor primer/lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan usaha terbesar dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur. Sepanjang 2018-2021 lapangan usaha ini mengkomposisi hampir 30% dari total output PDRB NTT. Lapangan usaha pertanian, kehutnan dan perikanan juga merupakan lapangan usaha dimana mayoritas angkatan kerja NTT bekerja didalamnya. yang menjadi persoalan adalah kemiskinan justru tersebar luas di wilaya-wilayah perdesaan dimana lapangan kerja ini adalah lapangan kerja yang dominan. Pendapatan dan Produktivitas pekerja yang rendah pada lapangan usaha primer ini menjadi salah satu dari banyak variabel yang mendorong terciptanya kantong-kantong kemiskinan di daerah. hal inilah yang menjadi alasan utama upaya pengentasan harus dilaksanakan pada urusan pertanian dan ketahanan pangan.

Pada urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat 4 (empat) Program yang mendukung penanggulangan kemiskinan yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Dari keempat program ini terdapat Kegiatan Pertanian Terintegrasi Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang mendukung pengembangan komoditas jagung sekaligus diintegrasikan dengan pengembangan ternak sapi dan ternak sedang (Kambing) atau ternak kecil seperti Ayam KUB Petelur. Kegiatan ini sangat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan. Total dana pada DPPA TA. 2021 sebesar Rp. 24.833.739.995.

Tabel 3.5
Program Kegiatan Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan, Penyediaan Peredaran Mutu Benih/Bibit Tanaman Pangan	Tersedianya Benih	6.013.195.510
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersedianya Produksi Jagung 1.318.802 Ton	16.129.244.485
Program Penyuluhan Pertanian	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Peningkatan Kompetensi kelompok tani dan penyuluh	2.200.000.000
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bibit, Benih ternak serta kewenangan Provinsi dalam pengendalian penyediaan dan produksi bibit/ benih ternak	Pengadaan Ternak kambing lokal untuk kelompok peternak (pemberdayaan berbasis aspirasi 2020)	450.000.000
		Pengadaan Ternak Ayam KUB Petelur untuk kelompok peternak (pemberdayaan berbasis aspirasi 2020)	41.300.000

Sumber: DPPA TA 2021

6. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sebagaimana pada urusan pertanian dan ketahanan pangan, upaya pengentasan penduduk miskin pada urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan berdasar pada fakta bahwa pendapatan dan produktivitas yang rendah pada bidang kelautan dan perikanan di NTT juga menjadi salah satu pendorong luasnya kemiskinan di daerah ini. hal lainnya adalah fakta bahwa potensi perikanan dan kelautan di NTT sebenarnya dapat menjadi salah satu senjata bagi daerah untuk memerangi kemiskinan di daerah ini mengingat potensinya sebagai wilayah kepulauan. setidaknya terdapat dua strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan daerah ini pada urusan kelautan dan perikanan: pertama, peningkatan nilai tambah produk-produk kelautan dan perikanan agar dapat mendorong peningkatan income masyarakat nelayan dan kedua: kampanye konsumsi ikan bagi bumil dan balita untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

Dukungan penanggulangan kemiskinan dari Urusan Kelautan dan Perikanan mencakup 2 (dua) program yaitu Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan total dana sebesar Rp. 4.777.600.000. Dari total dana ini, terdapat dana yang signifikan sebesar Rp. 4.497.600.000. yang digunakan untuk mendukung Ibu-ibu hamil dan Balita di Desa Stunting yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota pada Kegiatan Sistem Informasi dan Promosi Produk olahan Perikanan dalam rangka safari/kampanye Gemarikan.

Tabel 3.6
Program Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikana

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi
Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pengadaan Bantuan Cool Box	Terlaksananya pemberian paket bantuan cool box berinsulasi di desa stunting di 20 kab/kota	195.000.000
	Sistem Informasi dan Promosi Produk olahan Perikanan dalam rangka safari/kampanye Gemarikan	Terlaksananya pemberian bantuan produk olahan hasil perikanan untuk ibu hamil & Balita di desa stunting di 22 kab/Kota	4.497.600.000
Program Nilai tambah dan daya saing industri	pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan	Promosi produk kelautan dan perikanan (1 Promosi)	85.000.000

Sumber: DPPA TA 2021

7. Urusan Koperasi dan Tenaga Kerja

Lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang sehat dapat menjadi lokomotif yang mendorong masyarakat untuk menjadi lebih produktif, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mendorong maju upaya pengentasan penduduk miskin yang ada di daerah ini. sadar akan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT mendorong upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan Pada Urusan Koperasi dan Tenaga Kerja.

Pada urusan ini terdapat Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang diarahkan untuk meningkatkan jumlah Pelaku UMKM yang Memperoleh Bantuan Modal Usaha dengan dukungan dana sebesar Rp. 268.706.400.000.

Tabel 3.7
Program Kegiatan Urusan Koperasi dan Tenaga Kerja

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.	Jumlah Pelaku UMKM yang Memperoleh Bantuan Modal Usaha	268.706.400.000

Sumber: DPPA TA 2021

8. Urusan Transmigrasi

Pada urusan Transmigrasi terdapat Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan utama Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Pindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp. 129.800.000.-

Pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk berkontribusi terhadap upaya pengentasan penduduk miskin di Provinsi NTT, karena salah satu sebab kemiskinan di NTT adalah sulitnya program dan kegiatan pengentasan penduduk miskin menjangkau kelompok-kelompok miskin dan rentan yang tinggal pada wilayah-wilayah yang terpencil dan terisolasi. melalui program pembangunan kawasan transmigrasi dan kegiatan penataan persebaran penduduk ini diharapkan mempermudah pemerintah daerah dalam memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin dan rentan dan memudahkan masyarakat miskin dalam mengakses layanan pemerintah daerah.

Tabel 3.9
Program Kegiatan Urusan Transmigrasi

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah warga transmigran yang memperoleh bantuan pangan dan sarana prasarana	129.800.000

Sumber: DPPA TA 2021

9. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketersediaan energi yang memadai akan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. dapat dikatakan bahwa amat sulit untuk berharap peningkatan produktivitas ketika masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki dukungan listrik, misalnya. oleh sebab itu pemenuhan kebutuhan energi menjadi sangat vital dalam upaya peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan pendapatan, dan karenanya pengentasan penduduk miskin di NTT.

Dukungan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral untuk penanggulangan kemiskinan ada pada Program Ketenagalistrikan dengan Kegiatan utama Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana penyediaan Tenaga Listrik belum berkembang, Daerah terpencil dan Pedesaan untuk mencapai Rasio Elektrifikasi. Dengan demikian, tercapai upaya pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan melalui pelayanan bantuan instalasi sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu. Total alokasi dana DPPA TA. 2021 sebesar Rp. 375.200.000.

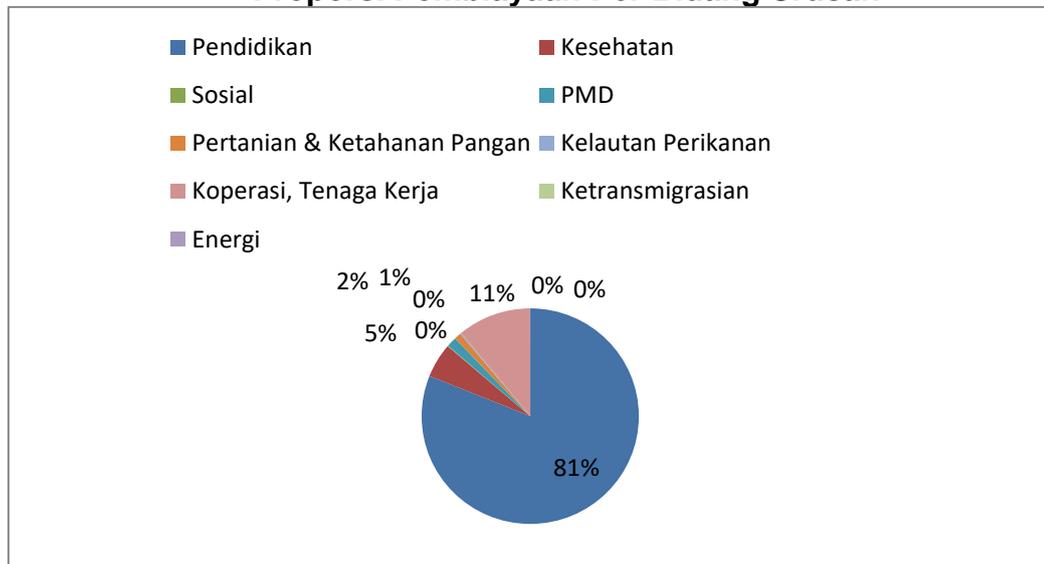
Tabel 3.9
Program Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Alokasi/ Pagu Realisasi
Program Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana penyediaan Tenaga Listrik belum berkembang, Daerah terpencil dan Pedesaan	Rasio Elektrifikasi	375.200.000

Sumber: DPPA TA 2021

Adapun proporsi pembiayaan per bidang urusan terhadap total pembiayaan adalah seperti pada Pie chart di bawah ini.

Gambar 3.1
Proporsi Pembiayaan Per Bidang Urusan



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa proporsi terbesar untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersumber dari Urusan Pendidikan sebesar 81,08% dari total anggaran yang telah teridentifikasi untuk penanganan kemiskinan. Sektor lainnya yakni Koperasi dan Tenaga Kerja, dan Kesehatan mengalokasikan anggaran masing-masing sebanyak 10,95% dan 5,17% Sementara itu, kontribusi bidang urusan lainnya

seperti Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pertanian dan Pangan, Koperasi, Tenaga Kerja dan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk penanggulangan kemiskinan berada di bawah 1,5%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di atas. (data sementara sambil menunggu data dari PUPR)

3.1.2 Kementerian/ Lembaga

Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga didukung melalui program/kegiatan 8 (delapan) lintas Kementerian/Lembaga. Program/kegiatan serta alokasi anggaran difokuskan untuk penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial tunai dan tunai, serta program pemberdayaan yang terkategori menjadi 4 (empat) Klaster yakni Padat Karya, Pelatihan, UMKM dan Vokasi. Rincian Program/Kegiatan dan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Rincian Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

No	Kementerian/ Lembaga	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Kementerian Agama	43,236,050,000
2	Kementerian Sosial	7,325,780,000
3	Kementerian Ketenagakerjaan	1,895,967,000
4	Kementerian Pertanian	11,223,088,000
5	Kementerian Lingkungan Hidup	300,000,000
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan	322,482,000
7	Kementerian Koperasi dan UMKM	332,847,686,800
8	Kementerian PUPR	830,476,067,000
Total		1,227,627,120,800

Pemerintah Pusat melalui 8 (delapan) Kementerian/Lembaga menganggarkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT sebesar Rp. 1.227.627.120.800 pada Tahun 2021.

Dari Tabel, kontributor terbesar untuk penanggulangan kemiskinan berasal dari Kementerian PUPR sebesar 67.65% dari total anggaran. Diikuti Kementerian Koperasi dan UMKM sebesar 27.11% dan Kementerian Agama

sebesar 3.52%. Sementara sumbangan dari Kementerian Pertanian, Sosial, Tenaga Kerja, Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup berturut - turut adalah 0.91%, 0.60%, 0.15%, 0.03% dan 0.02% dari total anggaran pada Tahun 2021. Selanjutnya program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan dari masing-masing kementerian dirincikan sebagai berikut.

1. Kementerian Agama

Tabel 3.10
Program Kegiatan Kementerian Agama

Program/ Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Bantuan Pendidikan (PIP, Bidik Misi, BOS)		43,236,050,000

2. Kementerian Sosial

Tabel 3.11
Program Kegiatan Kementerian Sosial

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Bansos PKH		3,336,880,000
Program Sembako		3,988,900,000
Total		7,325,780,000

3. Kementerian Ketenagakerjaan

Tabel 3.12
Program Kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan luar negeri Binalattas	1,564,346,000
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pengembangan dan peningkatan Produktivitas Binalattas	331,621,000
Total		1,895,967,000

4. Kementerian Pertanian

Tabel 3.13
Program Kegiatan Kementerian Pertanian

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Irigasi Perpipaan (PEN)	2,020,000,000
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Timur (PEN)	3,300,000,000
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Timur (PEN)	2,303,088,000
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Jaringan Irigasi Tersier	3,600,000,000
Total		11,223,088,000

5. Kementerian Lingkungan Hidup

Tabel 3.14
Program Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pelatihan vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	300,000,000
Total		300,000,000

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.15
Program Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Kualitas Lingkungan Hidup	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	322,482,000
Total		322,482,000

7. Kementerian Koperasi dan UMKM

Tabel 3.16
Program Kegiatan Kementerian Koperasi dan UMKM

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	Promosi produk UMKM Provinsi	240,564,000
Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	Penyuluhan Koperasi	1,111,600,000
Perkuatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro	Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (PEN)	331,495,522,800
Total		332,847,686,800

8. Kementerian PUPR

Tabel 3.17
Program Kegiatan Kementerian PUPR

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
Ketahanan Sumber Daya Air	Pembangunan Sarpras air tanah untuk air baku	78,798,280,000
Ketahanan Sumber Daya Air	Pembuatan Pompa Hidram dan Jaringannya	25,000,000,000
Ketahanan Sumber Daya Air	Rehabilitasi Sumur Air Baku	1,925,190,000
Ketahanan Sumber Daya Air	Pemeliharaan Bendungan	31,431,482,000
Ketahanan Sumber Daya Air	Pemeliharaan Embung	16,150,000,000
Ketahanan Sumber Daya Air	Pemeliharaan Sungai	750,000,000
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Kawasan Permukiman	106,146,797,000
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemugaran Permukiman Kumuh	1,500,000,000
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	39,431,427,000
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan SPAM Kab/Kota	320,820,196,000
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masy	83,322,695,000
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	125,200,000,000
Total		830,476,067,000

3.2 Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan diukur dari 5 (lima) Indikator Kemiskinan Konsumsi antara lain Persentase Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan serta Garis Kemiskinan.

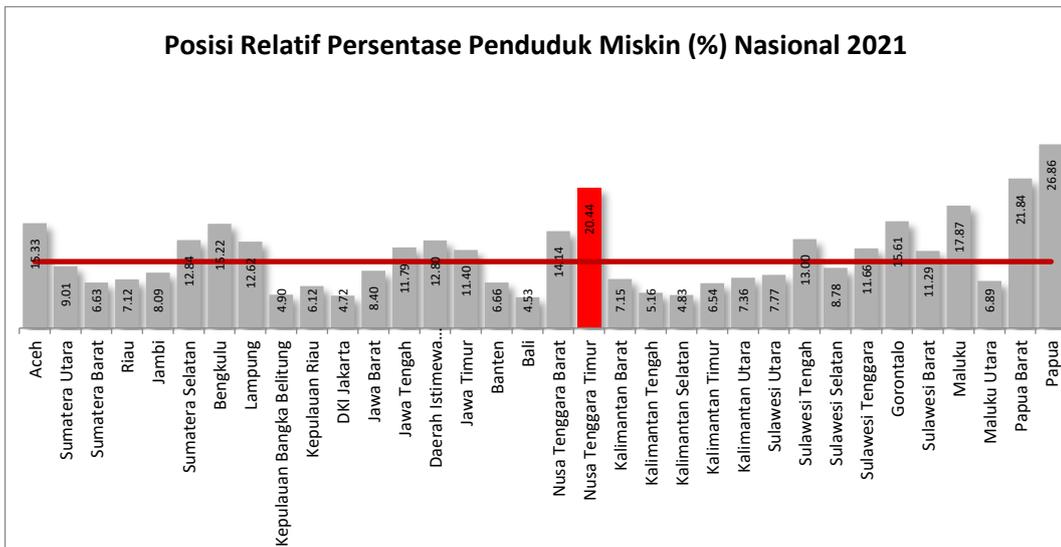
Sumber data yang selama ini digunakan yakni hasil SUSENAS yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada bulan Maret dan September setiap tahunnya. Selain indikator kemiskinan konsumsi dimaksud, indikator kemiskinan sektoral juga menjadi indikator multidimensi dalam mengevaluasi capaian penanggulangan kemiskinan.

Pada laporan ini hanya menyajikan capaian Indikator Kemiskinan Konsumsi yang dirincikan sebagai berikut:

a. **Persentase Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh BPS, persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode September 2021 sebesar 20.44 persen. Tingkat kemiskinan Provinsi NTT jauh di bawah capaian rata-rata nasional yakni sebesar 9.71 persen pada tahun yang sama. Dibandingkan dengan capaian provinsi lain, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi tiga teratas dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 20.44 persen pada Tahun 2021 bersama dua provinsi lainnya yakni Papua (26.86 persen) dan Papua Barat (21.84 persen). Sementara itu, provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni DKI Jakarta (4.72 persen), Kalimantan Selatan (4.83 persen) dan Bali (4.53 persen). Perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

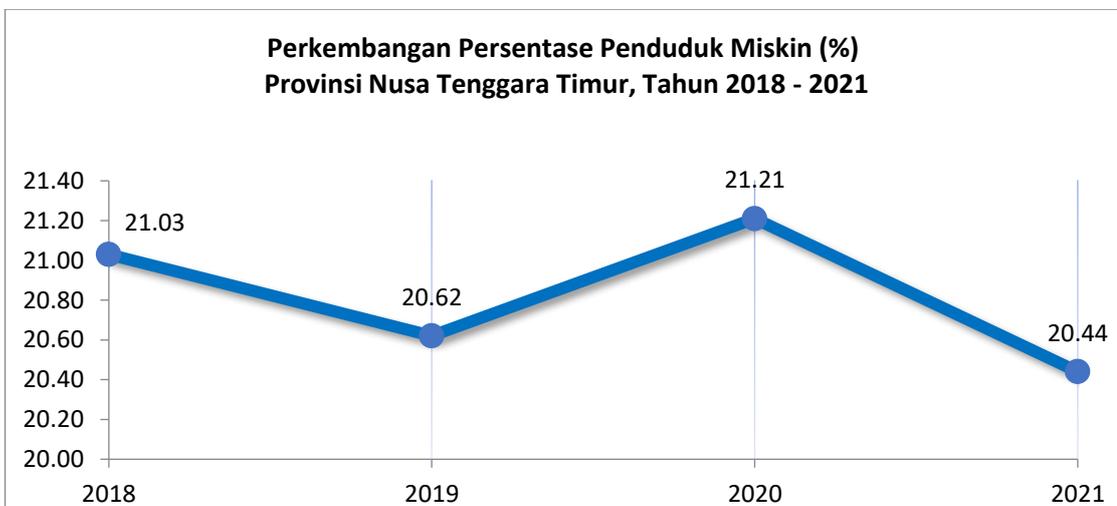
Grafik 3.1



Sumber: BPS (Susenas)

Tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur mengalami perkembangan fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Persentase penduduk miskin di NTT pada 2018 sebesar 21.03 persen dan kemudian bergerak turun menjadi 20.62 persen di tahun 2019. Akan tetapi, adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 21.21 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT terlihat menurun seiring kondisi perekonomian yang perlahan mulai meningkat yakni menjadi 20.44 persen pada September 2021. Perkembangan persentase penduduk miskin tahun 2018-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

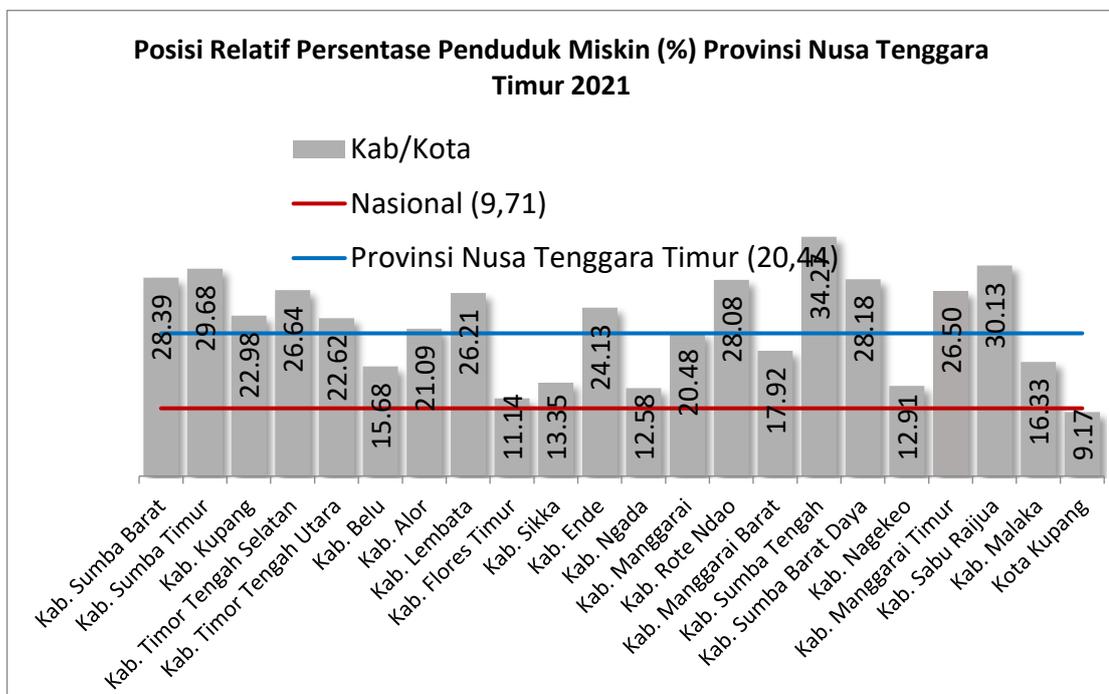
Grafik 3.2



Sumber: BPS (Susenas)

Selanjutnya, upaya penanggulangan kemiskinan di 22 kabupaten/kota menunjukkan hasil yang beragam. Hampir semua wilayah di Pulau Sumba dan Sabu dihadapkan dengan tingginya tingkat kemiskinan. Kabupaten Sumba Tengah tercatat dengan persentase tingkat kemiskinan paling tinggi di 2021 yakni sebesar 34.27 persen dan diikuti oleh Kabupaten Sabu Raijua sebesar 30.13 persen, Sumba Timur sebesar 29.68 persen, Sumba Barat sebanyak 28.39 persen dan Sumba Barat Daya sebesar 28.18 persen. Sebaliknya, kabupaten dengan persentase terendah yakni Kota Kupang (9.17 persen), Kabupaten Flores Timur (11.14 persen), Kabupaten Ngada (12.58 persen) dan Kabupaten Nagekeo (12.91 persen).

Grafik 3.3



Sumber: BPS (Susenas)

b. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2018-2021 menunjukkan tren fluktuatif dimana sepanjang 2018-2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 1.134.110 jiwa menjadi 1.129.460 jiwa atau berkurang sebesar 4.650 jiwa. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan, dimana jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 1.173.530 jiwa atau bertambah 44.070 jiwa.

Peningkatan ini sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak negatif pada aktivitas ekonomi baik di sektor formal maupun informal. Namun seiring dengan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan di Provinsi NTT, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 menjadi 1.169.310 jiwa atau berkurang 4.220 orang.

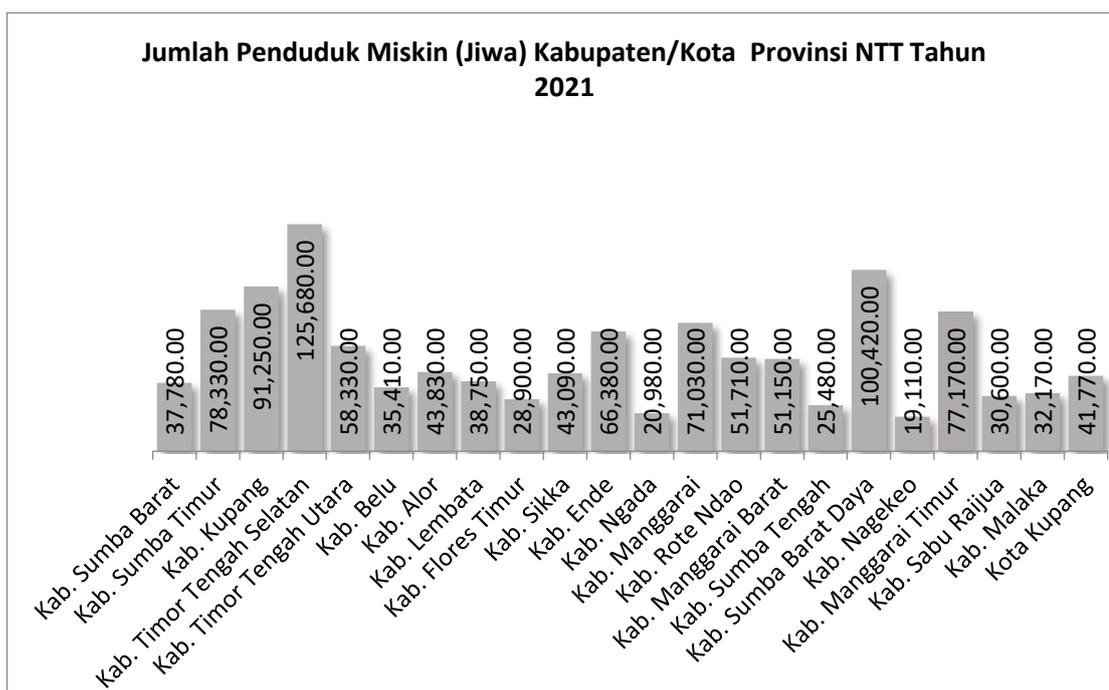
Grafik 3.4



Sumber: BPS (Susenas)

Sama halnya dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin tersebar di 22 kabupaten/kota dengan beragam capaian. Jika persentase penduduk miskin tertinggi umumnya ditempati oleh wilayah di Pulau Sumba, jumlah penduduk miskin paling banyak ditemukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mencapai 125,68 ribu jiwa pada tahun 2021 dan diikuti oleh Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 100,42 ribu jiwa. Selain itu, Kabupaten Kupang juga turut menyumbangkan jumlah penduduk miskin yang lumayan tinggi, sebanyak 91,25 ribu pada tahun yang sama. Sementara itu, Kabupaten Nagekeo dan Ngada tercatat dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, masing-masing 19,11 ribu jiwa dan 20,98 ribu jiwa. Selain itu, Sumba Tengah juga tercatat dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit sekitar 25,48 ribu jiwa namun secara proporsi penduduk miskin, Sumba Tengah menempati posisi teratas.

Grafik 3.5



Sumber: BPS (Susenas)

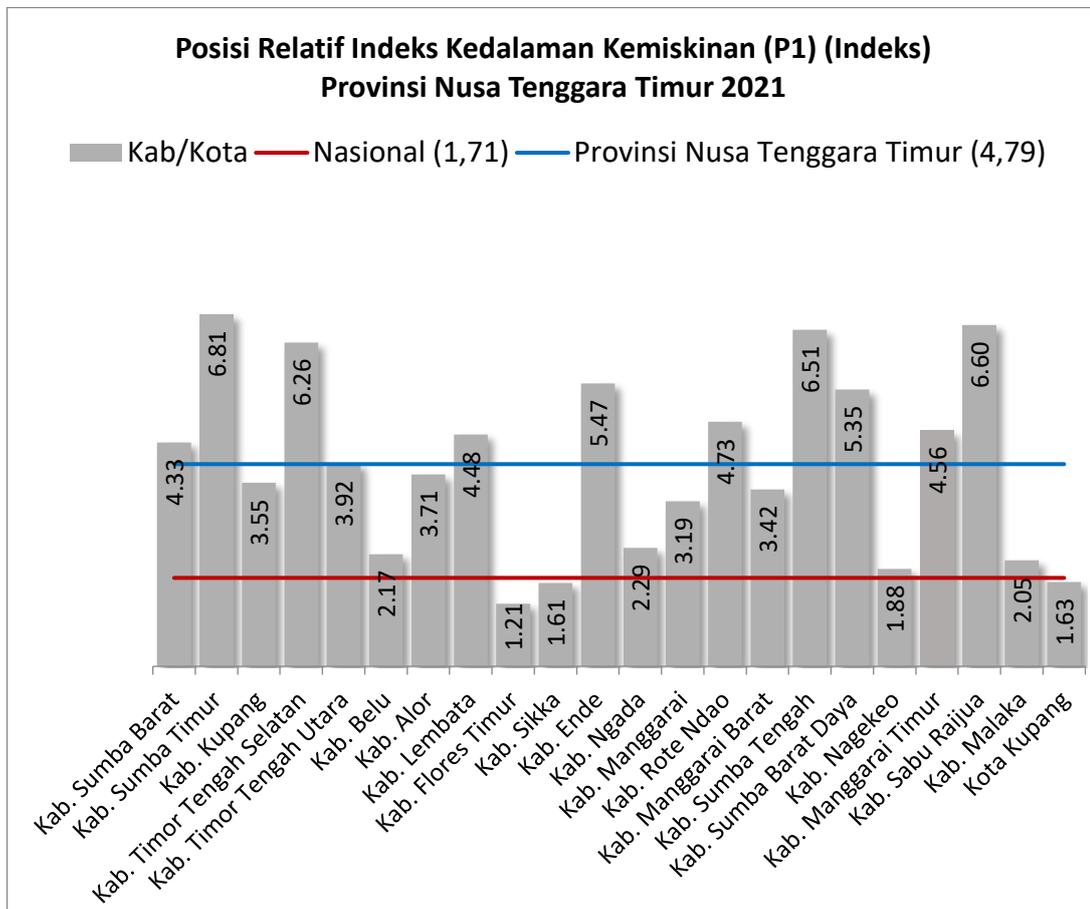
c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan adalah indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa dalam kemiskinan yang dirasakan penduduk. Semakin besar P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan non makanan) semakin jauh dari batas garis kemiskinan, sebaliknya jika P1 semakin mengecil menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan.

Pada September 2021 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 4.79 dimana capaian Provinsi NTT berada di bawah P1 nasional yakni sebesar 1.61. Jika dilihat capaian per kabupaten/kota se NTT Tahun 2021, kabupaten Sumba Timur menempati posisi pertama dengan indeks kedalaman kemiskinan paling tinggi yakni 6,81, diikuti oleh Sabu Raijua (6,60) dan Sumba Tengah (6.51). Capaian ketiga kabupaten ini berada di bawah rata-rata capaian provinsi maupun nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di ketiga kabupaten tersebut memiliki pendapatan yang masih jauh dari Garis Kemiskinan. Sebaliknya, Flores Timur tercatat dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan terendah yakni 1,21, diikuti oleh Sikka (1,61) dan Kota Kupang (1,63), capaian

ketiga kabupaten ini lebih baik dari capaian rata-rata provinsi dan bahkan secara nasional.

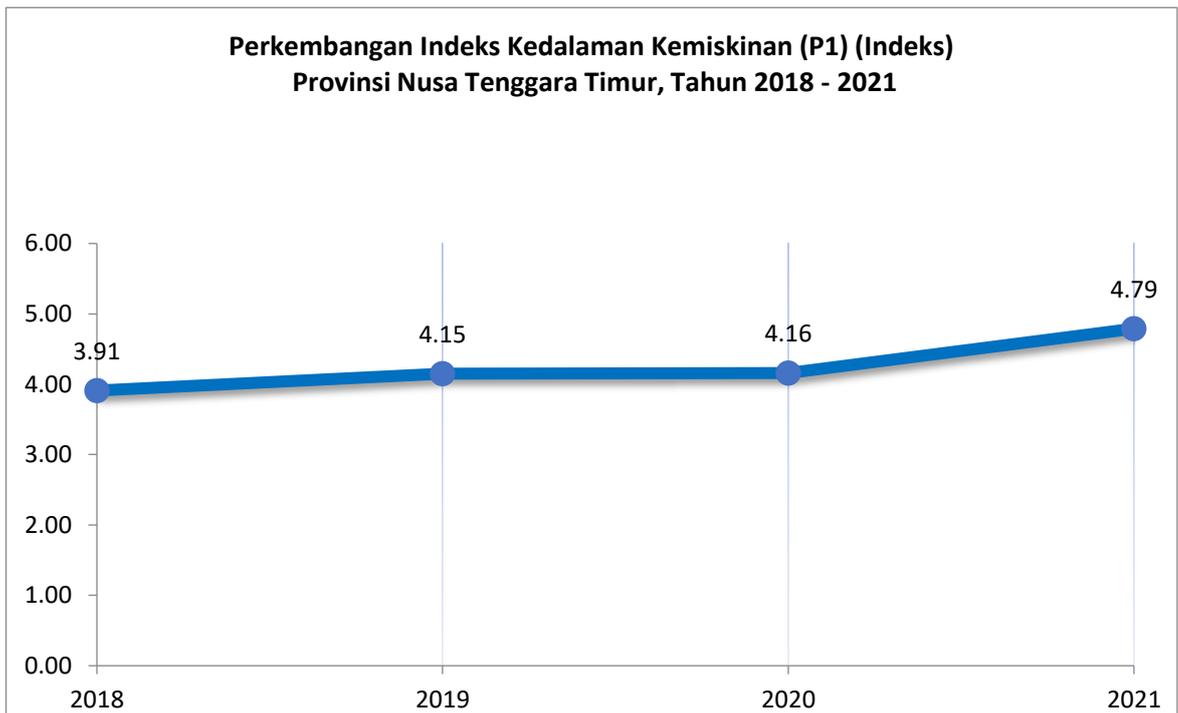
Grafik 3.6



Sumber: BPS (Susenas)

Perkembangan antar waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2021 menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Pada 2018, P1 Provinsi NTT sebesar 3,91 dan naik menjadi 4,15 atau mengalami kenaikan sebesar 0,24 pada 2019. Pada tahun 2020, sebagai dampak dari Covid-19 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi NTT juga menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 4.16. Setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sepanjang 2018-2020, P1 Provinsi NTT mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0.2 pada Maret 2021 menjadi 3.96, namun selang beberapa bulan P1 Provinsi NTT mengalami kenaikan menjadi 4,79 pada September 2021.

Grafik 3.7

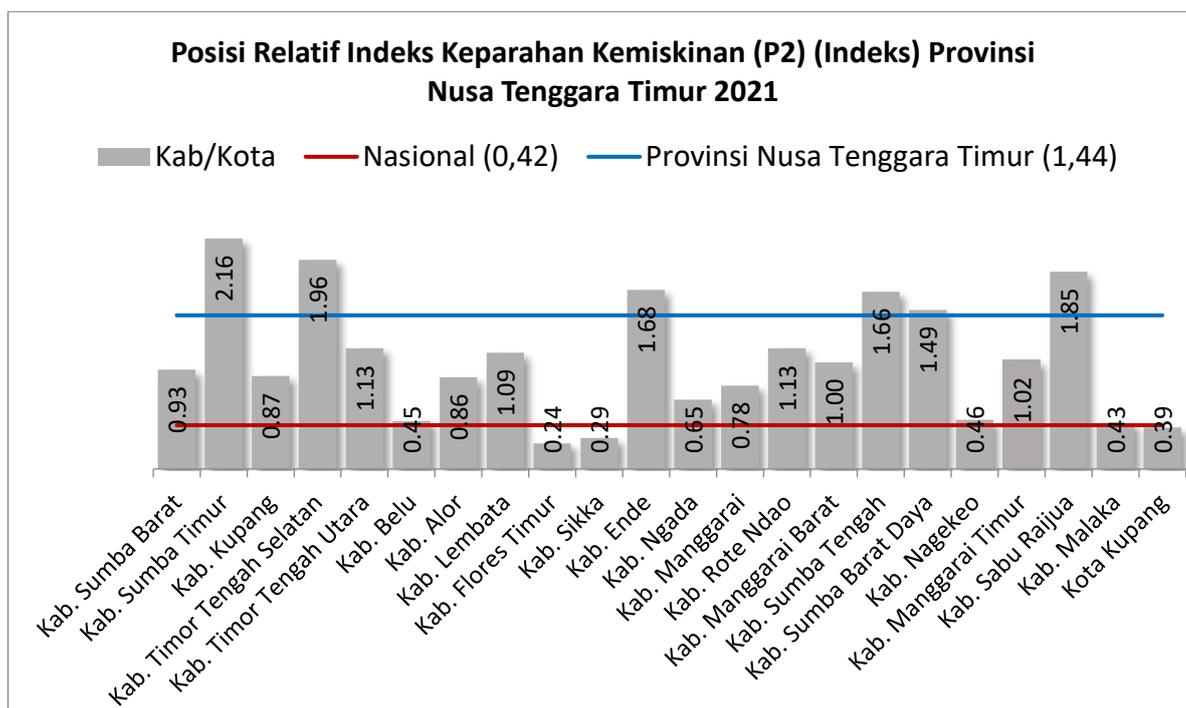


Sumber: BPS (Susenas)

d. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan data BPS pada September 2021, indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,44 dimana capaian jauh di bawah P2 nasional yakni sebesar 0,42. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) yang semakin kecil mengindikasikan kondisi yang lebih baik dan sebaliknya, semakin besar P2 menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang besar.

Grafik 3.8



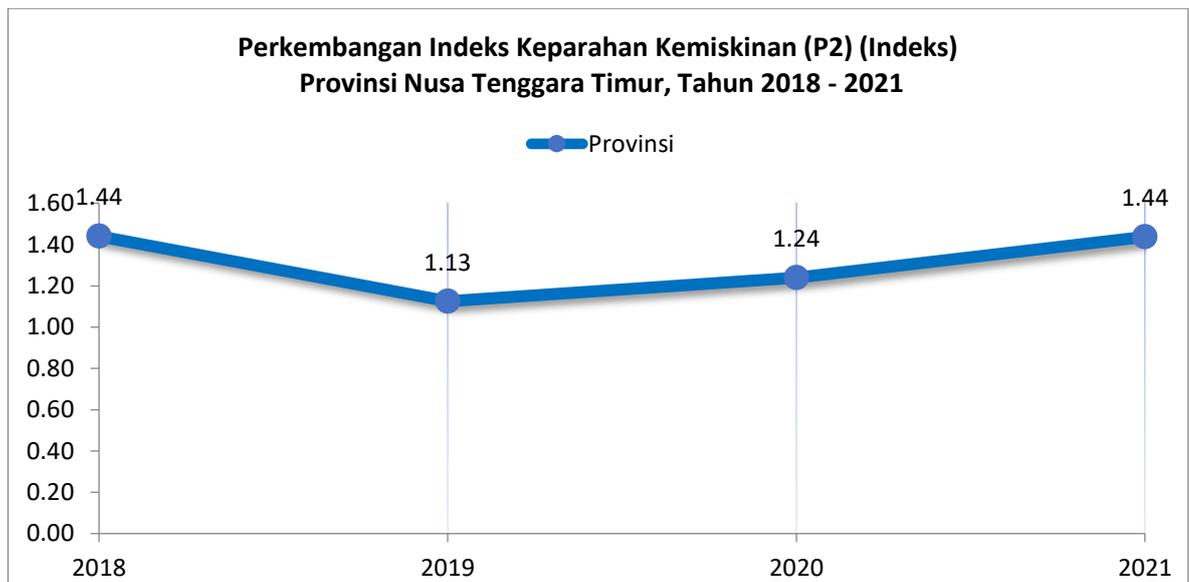
Sumber: BPS (Susenas)

Sebaran capaian Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten/Kota menunjukkan hasil yang bervariasi. Sama halnya dengan capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Sumba Timur juga tercatat dengan tingkat keparahan tertinggi pada 2021 sebesar 2,16 dan diikuti oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mencapai 1,96 dan diikuti oleh Sabu Raijua sebanyak 1,85. Capaian ini menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang cukup besar di ketiga kabupaten tersebut. Sebaliknya, kabupaten dengan ketimpangan pengeluaran yang lebih kecil ditemukan pada Kabupaten Flores Timur (0,24), Sikka (0,29) dan Kota Kupang (0,39). Capaian ketiga kabupaten tersebut bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata provinsi maupun nasional.

Perkembangan tingkat keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Sepanjang 2018-2019 tingkat keparahan kemiskinan di NTT mengalami penurunan dari 1.44 menjadi 1.13 atau berkurang sebesar 0.31. Selanjutnya, pada September 2020 tingkat keparahan kemiskinan Provinsi NTT sebesar 1.24 atau mengalami kenaikan 0.11 poin dibandingkan tahun 2019 dimana P2

sebesar 1.13. Kenaikan P2 ini sejalan dengan kenaikan persentase penduduk miskin (P0) dan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selanjutnya kenaikan P2 terus berlanjut pada kurun 2020-2021, mengalami kenaikan mencapai 1,44 pada September 2021. Capaian P2 pada September 2021 ini sama dengan kondisi capaian P2 Provinsi NTT pada 2018.

Grafik 3.9



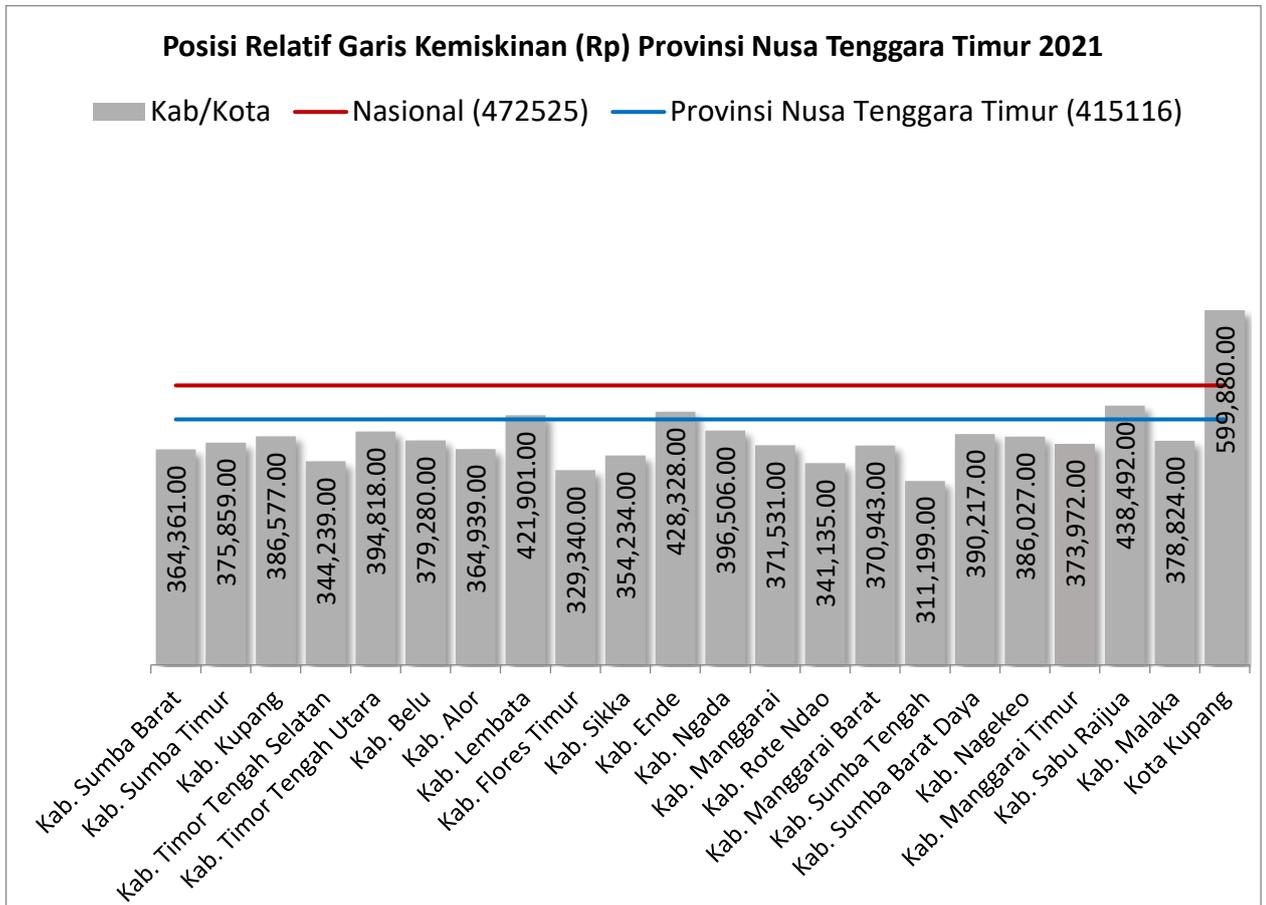
Sumber: BPS (Susenas)

e. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Pada 2021, Garis Kemiskinan di Provinsi NTT tercatat sebesar Rp. 415.116 /kapita/bulan, berada di bawah GK nasional yakni sebesar Rp. 472.525 /kapita/bulan. Jika dilihat perbandingan Garis Kemiskinan 22 Kabupaten/Kota se NTT, Kota Kupang menjadi wilayah dengan GK tertinggi se NTT sebesar Rp. 599.880/ kapita/bulan, jauh di atas GK provinsi maupun nasional. Selain Kota Kupang, Lembata juga menjadi kabupaten dengan GK tertinggi yakni sebesar Rp. 421.901/ kapita/ bulan. Sementara itu, rata-rata GK di kabupaten lainnya di kisaran Rp. 300an,

dengan GK terendah dimiliki oleh Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp. 311.199/ kapita/ bulan.

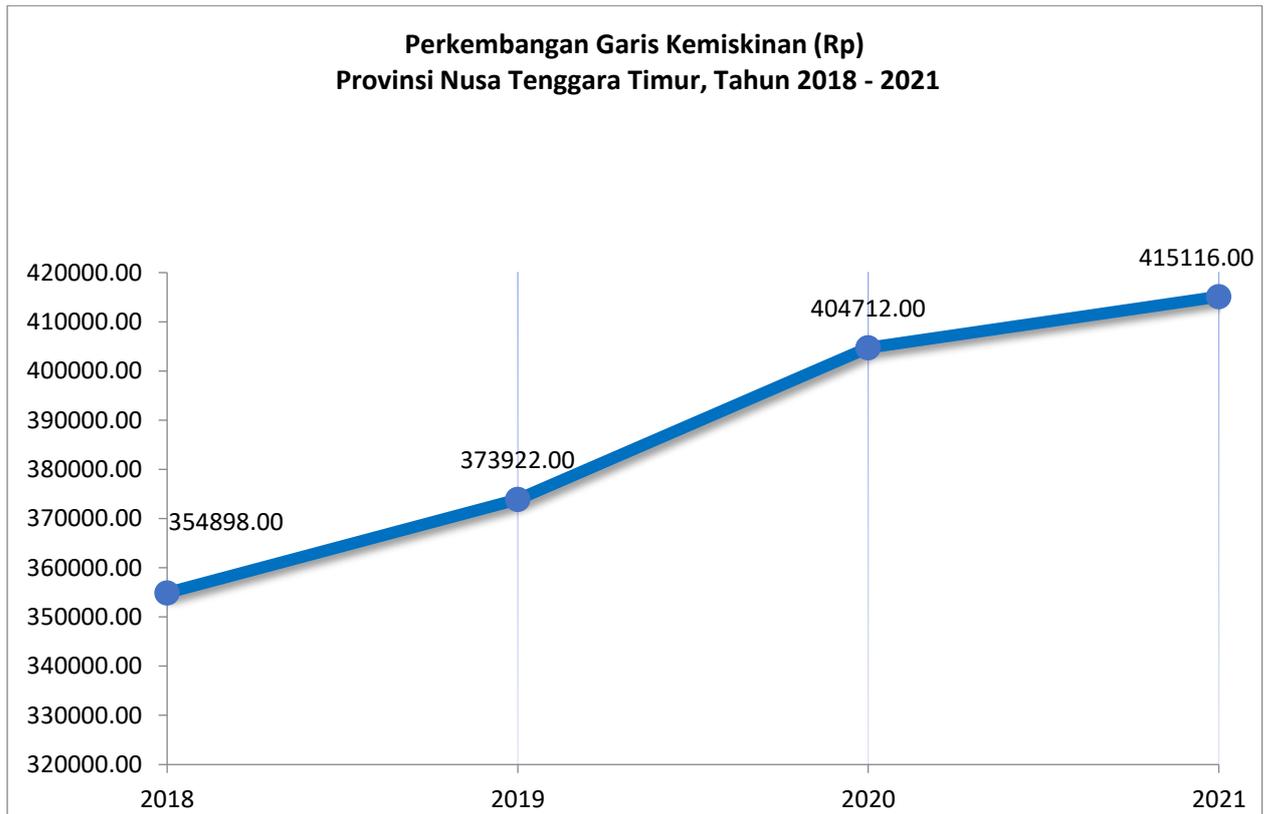
Grafik 3.10



Sumber: BPS (Susenas)

Garis Kemiskinan Provinsi NTT mengalami kenaikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dimana GK Provinsi NTT berada di angka Rp. 354.898/kapita/bulan pada 2018 dan kemudian perlahan naik hingga menyentuh Rp. 415.116/kapita/bulan pada Maret 2021. Kenaikan GK disebabkan oleh adanya kenaikan harga komoditas komponen makanan dan non-makanan pembentuk Garis Kemiskinan.

Grafik 3.11



Sumber: BPS (Susenas)

3.3 Capaian Kinerja Tahunan

Adapun capaian kinerja 09 (sembilan) urusan pemerintah yang dilaksanakan melalui pelaksanaan DPPA Tahun Anggaran 2021 secara singkat dilihat pada tabel berikut:

Tabel3.17
Matriks Capaian Kinerja Tahunan

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pendidikan	Perluasan layanan pendidikan menengah bagi anak usia 16-18 tahun dari kelompok masyarakat miskin	Meningkatnya jumlah anak usia 16-18 tahun dari kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan layanan Pendidikan menengah	Cakupan anak usia 16-18 tahun dari kelompok keluarga miskin yang memperoleh layanan Pendidikan menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 3. Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1. Penambahan Ruang Kelas Baru, Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	22 Kabupaten/ Kota	489,567,849,328	537,542,585,069	APBD 1

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
							2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	22 Kabupaten/ Kota	300,905,130,249	311,202,709,728	APBD 1
							3. Pengelolaan Pendidikan Khusus	3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus serta SD dan SMP, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	22 Kabupaten/ Kota	1,085,678,403,873	1,141,447,701,662	APBD 1

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
2	Kesehatan	Perluasan layanan kesehatan dasar bagi kelompok masyarakat miskin	meningkatnya jumlah keluarga miskin yang memperoleh layanan kesehatan dasar	cakupan keluarga miskin yang memperoleh layanan kesehatan dasar	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kasus kematian ibu	Pengadaan makanan tambahan Bumil KEK	terlaksananya makanan tambahan Bumil KEK	22 Kab/Kota	175 kasus	10,671,885,000	APBD/DAK
						Kasus Kematian Bayi	Pengadaan makanan tambahan Bumil KEK	terlaksananya makanan tambahan Bumil KEK	22 Kab/Kota	930 Kasus		
						Kasus Kematian Balita	Pengadaan makanan tambahan Bumil KEK	terlaksananya makanan tambahan Bumil KEK	22 Kab/Kota	1047 kasus		
						Persentase Kab/kota mencapai eliminasi malaria	penyelidikan epidemiologi 125 malaria	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi 125 malaria	7 Kab (SBD, Rote Ndao, Mabar, Kupang, Ende, Nagekeo, TTU)	25%	210,000,000	APBN
						Jumlah Kab/Kota dengan insidencence rate DBD <49/100.000 Penduduk	Pengadaan Logistik DBD	Terlaksananya Logistik DBD	22 Kab/Kota	19 Kab/Kota	50,050,000	APBD

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
						Prevalensi HIV/AIDS yang diobati	Biaya pemeriksaan viral load, terutama untuk ODHA yang telah mendapat ART selama 12 bulan pengobatan untuk 440 odha @450.00	Biaya pemeriksaan viral load, terutama untuk ODHA yang telah mendapat ART selama 12 bulan pengobatan untuk 440 odha @450.00	440 ODHA	52%	243,450,000	GF
						Prevalensi Balita Kurang Gizi	Pengadaan makanan tambahan balita kurus	terlaksananya Pengadaan makanan tambahan balita kurus	22 Kab/Kota	7%	5,045,760,000	APBD/DA K
						Prevalensi Stunting	Pengadaan makanan tambahan balita kurus	terlaksananya Pengadaan makanan tambahan balita kurus	22 Kab/Kota	20.90%		
						Cakupan kesehatan masyarakat	iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP Kelas 3	Terlaksananya iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP Kelas 3	22 Kab/Kota	86.19%	108,455,810,589	APBD
					Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	persentase SDM ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya	honor PTT Puskesmas, UPT, RS Jiwa Naimata dan RS Undana	Terlaksananya honor PTT Puskesmas, UPT, RS Jiwa Naimata dan RS Undana	22 Kab/Kota	100%	2,505,951,270	APBD

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
3	Sosial	Perluasan upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengendalian layanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Warga KAT yang siap menerima pemberdayaan	Program Pemberdayaan Sosial	meningkatnya kemandirian warga KAT yang sudah diberdayakan	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga KAT memperoleh Pemberdayaan	Kab Kupang	100%	2,015,000,000	APBN 2021 (TP)
			Meningkatnya Kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Jumlah warga KAT yang meningkat akses terhadap pelayanan sosial dasar				Jumlah Lokasi KAT yang memperoleh bantuan sarana Prasarana lingkungan sosial				
				Jumlah warga KAT yang mendapatkan stimulan pemberdayaan KAT								
				Jumlah warga KAT yang siap purnabina								

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, kelembagaan masyarakat hukum adat	1140 Unit Desa	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat/berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	Peningkatan Jumlah Bumdes Aktif	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah Kabupaten/Kota		1484 Unit Desa	130.18%	36,578,322,110	Dana Transfer Umum-DAU
						Peningkatan Jumlah BUMDes di kawasan pariwisata Estate		95 Unit desa		84.21%		Dana Transfer Umum-DAU
						Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)		773 Unit Desa		78.53%		Dana Transfer Umum-DAU

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
						Posyandu Aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali		5792 Posyandu		105.04%		Dana Transfer Umum-DAU
						PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi Keluarga, Pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan		60 PKK Aktif		103.14%		Dana Transfer Umum-DAU
						Persentase lembaga adat desa yang difasilitasi		33.3 lembaga adat desa		27.30%		Dana Transfer Umum-DAU
					Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register		90 Desa		7.76%		Dana Transfer Umum-DAU
						Persentase perubahan status desa minimal berkembang		33.3 status desa minimal berkembang		300.30%		Dana Transfer Umum-DAU

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
						Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non Pemerintah (BUMDes) BKAD, BPMD, Posyandu)		31,8 (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu)		93.65%		Dana Transfer Umum-DAU
5	Pertanian	Perluasan akses rumah tangga petani/peternak miskin terhadap sarana dan prasarana pertanian serta pelayanan penyuluhan	Meningkatnya jumlah rumah tangga petani/peternak miskin yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana pertanian	Cakupan rumah tangga petani/peternak miskin yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Benih Bersertifikat	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	-	-	-	-	Tdk ada alokasi anggaran APBD
							Pengawasan, Penyediaan Peredaran Mutu Benih/Bibit Tanaman Pangan	Tersedianya Benih Padi di penangkar (175 Ha = 350 Ton)	Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat, Sikka, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat	100%	904,394,100	APBD

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
								Tersedianya Benih Jagung di Penangkar (125 Ha = 250 Ton)	Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Sumba Tengah, SBD, Sikka, Manggarai Timur	100%	600,568,480	APBD
								Tersedianya Benih Kedelai di Penangkar (50 Ha = 50 Ton)	Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sumba Tengah dan Sumba Timur	100%	176,619,160	APBD
								Tersedianya Benih Kacang Hijau di Penangkar (100 = 80 Ton)	Kabupaten TTS, TTU, Malaka, Sikka dan Manggarai Timur	100%	291,576,000	APBD
								Tersedianya Benih Kacang Tanah di Penangkar (30 Ha = 24 Ton)	Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Sumba Timur	100%	201,282,260	APBD

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
								Tersedianya Benih Sumber Padi di Balai Benih (50 Ha = 100 Ton)	BBI/BBU (Kab. Kupang, Rote Ndao, Sikka, Nagekeo, Ngada dan Manggarai Barat)	100%	2,747,278,260	APBD
								Tersedianya Benih Sumber Jagung di Balai Benih (30 Ha = 60 Ton)	BBI/BBU (Kab. Kupang, Rote Ndao, Sikka, Nagekeo, Ngada dan Manggarai Barat)	100%	1,091,477,250	APBD
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan yang difasilitasi :	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian					
						Produksi Padi (Tahun 2023 = 1.471.176 Ton)		Tersedianya Produksi Padi 1.360.249 Ton	-	53.84%	-	Tdk ada alokasi anggaran APBD
						Produksi Jagung (Tahun 2023 = 1.853.552 Ton)		Tersedianya Produksi Jagung 1.318.802 Ton	21 Kabupaten	57.02%	16,129,244,485	APBD
						Produksi Cabe (Tahun 2023 = 8.910 Ton)		Tersedianya Produksi Cabe 8.239 Ton	-	51.75%	-	Tdk ada alokasi anggaran APBD
						Produksi Kacang Tanah (Tahun 2023 = 12.105 Ton)		Tersedianya Produksi Kacang Tanah 11.193 Ton	-	98.88%	-	Tdk ada alokasi anggaran APBD

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
						Produksi Kacang Hijau (Tahun 2023 = 8.382 Ton)		Tersedianya Produksi Kacang Hijau 7.750 Ton	-	147.96%	-	Tdk ada alokasi anggaran APBD
						Produksi Bawang Merah (Tahun 2023 = 5.264 Ton)		Tersedianya Produksi Bawang Merah 4.842 Ton	-	189.26%	-	Tdk ada alokasi anggaran APBD
				Meningkatnya jumlah rumah tangga petani/peternak miskin yang mendapatkan layanan pendampingan dan penyuluhan usaha	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut kelas :	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Peningkatan Kompetensi kelompok tani dan penyuluh	Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Kupang dan Belu	2 kelompok tani dan 120 orang	2,200,000,000	APBD
						Kelas Pemula Baru (Tahun 2023 = 1000 Kelompok)						
						Kelas Lanjut Baru (Tahun 2023 = 400 Kelompok)						
6	Peternakan		Kelompok Masyarakat	Meningkatnya Pendapatan dan ekonomi masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Populasi Produksi dan Produktivitas Ternak	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bibit, Benih ternak serta kewenangan Provinsi dalam pengendalian penyediaan dan produksi bibit/benih ternak	Pengadaan Ternak kambing lokal untuk kelompok peternak (pemberdayaan berbasis aspirasi 2020)	TTS (Noemke(1), Bena (3))	60,000,000	180,000,000	APBD 2021

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
									Manggarai Timur (Komba (1))	15,000,000	150,000,000	APBD 2021
									Sumba Timur (Lumbu Kore (2), Mauliru (1))	45,000,000	120,000,000	APBD 2021
								Pengadaan Ternak Ayam KUB Petelur untuk kelompok peternak (pemberdayaan berbasis aspirasi 2020)	TTS (Bena (1))	4,130,000	24,780,000	APBD 2021
									Sumba Timur (Lumbu Kore (2))	4,130,000	16,520,000	APBD 2021

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
7	Kelautan dan Perikanan	Dengan adanya kebijakan Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada dinas kelautan dan perikanan Prov NTT dapat menurunkan angka stunting dan dapat menanggulangi kemiskinan	Pemberian paket bantuan cool box berinsulasi pada desa stunting di 20 kab/kota	Tersalurnya paket bantuan cool box berinsulasi di desa stunting di 20 Kab/Kota masing-masing 1 unit	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Tambahan angka Konsumsi Ikan	Pengadaan Bantuan Cool Box	terlaksananya pemberian paket bantuan cool box berinsulasi di desa stunting di 20 kab/kota	20 Kab/Kota	20 unit coolbox berinsulasi%	195,000,000	APBD
			pemberi paket bantuan paket olahan ikan untuk ibu hamil dan balita pada desa stunting di 22 kab/kota	tersalurnya pemberian paket bantuan produk olahan perikanan untuk ibu hamil dan balita pada desa stunting di 22 kab/kota	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Tambahan angka Konsumsi Ikan	Sistem Informasi & Promosi Produk olahan Perikanan dalam rangka safari/kampanye Gemarikan	terlaksananya pemberian bantuan produk olahan hasil perikanan untuk ibu hamil & Balita di desa stunting di 22 kab/Kota	22 Kab/Kota	1540 Ibu Hamil & 2.200 Balita	4,497,600,000	APBD

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
		Dengan adanya kebijakan Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada dinas kelautan dan perikanan Prov NTT dapat menurunkan angka stunting dan dapat menanggulangi kemiskinan	Terlaksananya promosi produk kelautan dan perikanan untuk ibu hamil dan Balita	Jumlah Promosi Produk kelautan dan perikanan sebanyak 1 promosi (gemarikan kepada Ibu Hamil dan Balita)	Program Nilai tambah dan daya saing industri	Tambahan angka Konsumsi Ikan	pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan	promosi produk kelautan dan perikanan (1 Promosi)	Kab. TTS	1 Promosi	85,000,000	APBN
8	Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.	Meningkatnya nilai transaksi UMKM melalui peningkatan permodalan UMKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UMKM dan peningkatan kemitraan UMKM dengan usaha besar	Persentase kelompok perempuan yang mendapatkan bantuan modal usaha	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase kelompok perempuan yang mendapatkan bantuan modal usaha	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan.	Jumlah Pelaku UMKM yang Memperoleh Bantuan Modal Usaha	22 Kab/Kota	74%	268,706,400,000	APBN

No	Sektor/ Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	capaian		Sumber Pendana an
										Kinerja	Pagu	
	Ketransmigrasian	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbangunnya wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi unit permukiman transmigrasi baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran	Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Unit permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Pindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah warga transmigran yang memperoleh bantuan pangan dan sarana prasarana	Kab. Malaka, Sumba Timur, Rote Ndao, Alor, Sumba Barat, TTS, TTU, Belu dan Sumba Tengah	85%	129,800,000	APBN
9	Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Tersedianya anggaran untuk pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Rasio elektrifikasi (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	Program Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi dari Non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana penyediaan Tenaga Listrik belum berkembang, Daerah terpencil dan Pedesaan		Bagi Kabupaten atau Daerah yang mengalami rasio elektrifikasi rendah	58.42%	375,200,000	APBD

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

Bab ini mendiskusikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT kedepan. Rencana tindak lanjut ini dirumuskan berdasar pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, khususnya berkenaan dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan yang telah didiskusikan pada Bab II maupun data Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan pada Bab III. Adapun rencana tindak lanjut dari Laporan ini meliputi:

1. Optimalisasi konvergensi program/kegiatan dan anggaran penanganan kemiskinan.

Dalam penanganan kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Timur, berbagai upaya telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait. Pada Bab 3 telah diuraikan program/kegiatan beserta realisasinya, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Berdasarkan paparan data dimaksud, tampak bahwa upaya mengintervensi kemiskinan telah dilakukan secara serius sejauh ini. Berbagai program/ kegiatan telah diupayakan untuk mengintervensi secara simultan penduduk miskin yang ada di Nusa Tenggara Timur. Intervensi dimaksud dapat dikategorikan kedalam2 (dua) bentuk, yakni: 1) Penguatan jarring pengaman sosial (*social safety nets*), yang mana berfungsi sebagai “jarring penahan” bagi orang miskin untuk tidak terseret masuk lebih dalam ke dalam jebakan kemiskinan (*poverty trap*). Intervensi ini terefleksi dari adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota kepada penduduk miskin ekstrim di Nusa Tenggara Timur. Dengan menerima bantuan dimaksud, penduduk miskin diharapkan memiliki peningkatan pendapatan/kemampuan konsumsi agar tidak terseret ke dalam kondisi kemiskinan yang semakin dalam/parah. 2) Peningkatan kapabilitas penduduk miskin. Intervensi ini terefleksi dari berbagai program/ kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapabilitas penduduk miskin untuk jangka pendek maupun panjang. Untuk jangka pendek, misalnya, melalui perluasan akses pembiayaan usaha produktif seperti yang dilakukan pada program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Melalui intervensi program ini, pemerintah memperluas akses langsung bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan skala ekonomi yang bermuara pada peningkatan kapabilitas ekonomi dari

penduduk miskin. Sedangkan untuk jangka panjang, misalnya, melalui pemberian makanan tambahan kepada bayi/ibu hamil dari keluarga miskin. Intervensi ini bertujuan agar anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berada dalam kondisi miskin saat ini dapat memperoleh asupan gizi yang memadai sebagai salah satu prasyarat untuk dapat tumbuh kembang secara sehat. Dengan kondisi demikian, setelah dewasa, anak-anak tersebut diharapkan dapat memiliki kapabilitas untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja atau tidak lagi mewarisi kondisi miskin dari orang tuanya sebagai akibat tidak mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja.

Meski demikian, tampak pula bahwa konvergensi berbagai program/kegiatan dimaksud masih perlu dioptimalkan guna memberi dampak yang lebih signifikan bagi penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana tampak pada Bab 2 maupun 3, aktor-aktor yang terlibat dalam intervensi yang telah dilakukan masih perlu diperluas. Selain itu, realisasi program/kegiatan yang ada masih terkendala dengan adanya refocusing anggaran maupun masih kurang sinkron dalam menyasar individu yang ditargetkan.

Untuk itu, tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap persoalan-persoalan ini yakni optimalisasi konvergensi program/kegiatan dan anggaran penanganan kemiskinan. Berbagai program/kegiatan akan ditingkatkan kesolidannya sehingga daya tembus terhadap persoalan kemiskinan akan diupayakan untuk semakin meningkat. Sebagai misal, disaat ini sedang diinisiasi pembuatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di-*overlay* dengan data kemiskinan pada Kabupaten/ Kota di NTT. Hal ini merupakan salah satu contoh langkah konkrit untuk meningkatkan focus dalam penanganan kemiskinan di NTT.

2. Terus mendorong peningkatan permintaan agregat (*agregat demand*) pada skala provinsi

Permintaan agregat bekerja dalam ruang makro. Jika kebijakan *pro-poor* (sebagaimana telah didiskusikan pada poin 1 (satu)) bekerja secara inklusif pada ruang spesifik, yang mana khusus mensasar penduduk miskin secara langsung maka peningkatan permintaan agregat akan mensasar keseluruhan penduduk di NTT. Secara konseptual, peningkatan permintaan agregat akan menstimulasi peningkatan pendapatan penduduk miskin atau dalam ilmu ekonomi pembangunan dikenal dengan prinsip *spill-over/ trickledown effect*. Peningkatan

skala ekonomi desil menengah ke atas akan menstimulasi peningkatan skala ekonomi bagi desil bawah. Dengan meningkatnya pendapatan penduduk kelas menengah maka (*ceteris paribus*/ dengan asumsi variable lainnya konstan), permintaan agregat, khususnya kelas menengah juga akan meningkat. Peningkatan kemampuan konsumsi ini akan mendorong permintaan barang/jasa yang di-*supply* oleh para produsen, termasuk penduduk miskin. Sebagai misal, dengan meningkatnya pendapatan/ skala ekonomi dari kelas menengah maka sayuran di pasar yang dipasok oleh penduduk miskin akan meningkat permintaannya dan implikasinya, pendapatan penjual sayur tersebut akan meningkat pula.

Selanjutnya, secara tidak langsung, peningkatan permintaan agregat ini akan memperbesar ruang fiskal yang berfokus pada anggaran pengentasan kemiskinan. Permintaan akan barang dan jasa akan meningkatkan penerimaan negara baik dari pajak maupun retribusi. Implikasinya, Pemerintah akan memainkan fungsi redistribusi yang semakin solid karena penerimaan negara yang dikumpulkan dari desil menengah ke atas akan semakin banyak untuk didistribusi kepada penduduk miskin melalui skema/program “pro-poor”.

Pra kondisi yang akan dilakukan/ tindaklanjut untuk mendorong permintaan agregat yakni dengan menyediakan kondisi yang kondusif bagi bekerjanya mekanisme pasar di NTT. Hal ini mencakup kebijakan moneter dan fiskal yang dimainkan berbagai pemangku kepentingan. Terkait fiskal, misalnya, infrastruktur dasar untuk mendorong konsumsi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara, akan terus ditingkatkan kualitasnya. Selanjutnya, terkait moneter, berbagai kebijakan makro, seperti pengendalian inflasi, akan terus diinsiasi oleh Pemerintah. Inflasi yang terkendali akan menjamin kondisi ekonomi yang stabil untuk memastikan aktivitas produsen dan konsumen di NTT terus bergeliat dan dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang inklusif terus terjadi kedepan.

3. Mendorong penyediaan data kemiskinan yang tunggal, akurat dan berkesinambungan.

Data penduduk miskin merupakan persoalan klasik yang akan terus didorong keakuratan dan ketersediaannya secara berkesinambungan. Data terus menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan karena keakuratannya selalu

ditemui di lapangan. Dalam penyaluran Bantuan Penanganan Kemiskinan Ekstrem 2021 pada 5 (lima) kabupaten di Nusa Tenggara Timur, misalnya, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan ini menemukan bahwa *Inclusion/exclusion errors* selalu ditemui dalam basis data kemiskinan. Hal ini disebabkan karena terdapat penduduk terkategori tidak miskin namun terdata sebagai penduduk miskin (*inclusion errors*). Demikian pula sebaliknya dimana terdapat penduduk miskin yang tidak dimasukkan kedalam basis data penerima bantuan penanganan kemiskinan ekstrem (*exclusion errors*). Selain itu, ditemui pula bahwa masih banyak penduduk miskin yang terdata sebagai Penerima Manfaat (*beneficiaries*) yang memiliki data kependudukan yang bermasalah, seperti NIK yang tidak terbaca pada basis data DitjenDukcapil, Kemendagri.

Guna mengintervensi persoalan seperti ini, sesungguhnya Pemerintah Pusat telah berupaya merumuskan kebijakan yang relevan. Data kemiskinan berbasis individu (*by name by address*) yang selama ini digunakan yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), telah dilengkapi dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE merupakan data subset dari data PK-BKKBN 2021 yang telah diberikan rangking dan divalidasi dengan data NIK oleh DitjenDukcapil Kemendagri. Hadirnya kebijakan ini berupaya mengeliminir persoalan klasik terkait keakuratan data.

Namun demikian, masih ditemui pula bahwa kebijakan terkini terkait peningkatan keakuratan basis data kemiskinan masih menyisakan sejumlah persoalan. Berdasarkan Susenas BPS, Maret 2021, masih banyak penduduk miskin (desil 1-4) yang tidak memperoleh intervensi pemerintah, seperti BLT, dan sebaliknya, masih terdapat penduduk pada desil menengah atas yang menerimanya. Persoalan krusial lainnya yakni cakupan (*coverage*) pendataan penduduk miskin masih belum komprehensif. Data P3KE yang melengkapi DTKS hanya mencakup 82,78% penduduk Indonesia atau hanya mendata 225.338.582 jiwa dari total 272.229.372 total jiwa per 31 Juni 2021. Hal ini mengindikasikan pula bahwa belum seluruh penduduk Nusa Tenggara Timur yang terdata pada P3KE. Implikasinya adalah persoalan *inclusion/exclusion errors* akan tetap tinggi dalam konteks Nusa Tenggara Timur.

Persoalan selanjutnya yang erat kaitannya dengan basis data kemiskinan saat ini adalah kesinambungan pendataan. Di satusisi, basis data P3KE yang ada saat ini telah menyediakan informasi yang berarti terkait desil/kelompok

ekonomi penduduk yang selanjutnya melengkapi basis data yang disediakan oleh DTKS. Meski demikian, di lain sisi, persoalan yang selanjutnya ditemui adalah kesinambungan ketersediaan data, yang mana sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan. Basis data yang tersedia secara berkesinambungan (*time series*) dapat menyediakan informasi berupa tren/fluktuasi data. Hadirnya P3KE diharapkan melengkapi DTKS yang menjadi basis data kemiskinan saat ini namun di saat ini pula, Regsosek didesain untuk menjadi basis data tunggal untuk penanggulangan kemiskinan kedepan. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa kesinambungan data masih menjadi persoalan saat ini.

Berdasarkan uraian pada poin 2 ini, dapat dikemukakan bahwa tindak lanjut yang akan dilakukankedepanyaknipenyediaan data kemiskinan yang akurat, komprehensif dan berkesinambunganakanterusdidorong. Pada berbagai forum atau media, akan dikemukakan kepada para pemangku kepentingan terkait agar data yang dihasilkan dapat ditingkatkan keakuratannya. Misalnya, berkenaan dengan data P3KE, kader BKKBN akan terus didorong agar persoalan *inclusion/exclusion errors* terus diminimalisir. Hal ini dapat dilakukan dengan pencacahan secara teliti, rutin dan menyeluruh pada setiap rumah tangga. Peningkatan keakuratan ini akan menjadi lebih akseleratif apabila turut dilakukan oleh Perangkat Daerah pada setiapKabupaten/Kota. Selainitu, P3KE, DTKS, dan data Regsosek agar diintegrasikan agar kesimbangan data menjadi lebih baik kedepan.

Dengan tersedianya basis data kemiskinan yang solid, tentunya, para pemangku kepentingan akan semakin mudah dalam mengintegrasikan berbagai program/kegiatan dan anggaran untuk mengintervensi setiap individu yang menjadi target intervensi. Pada muara, aksi korvergen ini akan memberi daya dorong yang semakin besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.

4. Mendorong penggunaan metode penghitungan yang seragam/paralel.

Metode penghitungan kemiskinan juga menjadi persoalan klasik dan krusial dalam agenda pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode penghitungan menjadi sangat penting karena menjadi basis dalam mengukur tingkat dan tren kemiskinan suatu wilayah yang selanjutnya menjadi justifikasi untuk tindak lanjut penanganan kemiskinan kedepan. Sejauh ini, metode pengukuran yang telah

digunakan di Indonesia adalah metode pengukuran dengan pendekatan moneter. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dalam hal kapasitas moneter untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan. Melalui lensa ini, penduduk yang miskin secara moneter didefinisikan sebagai mereka yang memiliki konsumsi bulanan rata-rata di bawah garis kemiskinan, yang, misalnya, ditetapkan pada Rp 392.154 (US \$ 27) pada bulan September 2018.

Belakangan ini, Pemerintah mengembangkan dan mengaplikasikan basis data kemiskinan (P3KE) dengan metode pengukurannya sendiri untuk memotret penduduk miskin. Berbeda dengan DTKS, P3KE menyajikan desil untuk mengklasifikasikan tingkat pendapatan seluruh penduduk Indonesia. Berdasarkan metode dimaksud, keparahan/ kedalaman kemiskinan dapat terpotret secara baik pada setiap rumah tangga. Hal ini selanjutnya memudahkan intervensi kebijakan secara langsung kepada individu-individu dalam rumah tangga miskin.

Pemerintah juga sedang melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh provinsi di Indonesia. Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Regsosek adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Meski terus berupaya menyajikan data yang solid sebagai basis kebijakan penanggulangan kemiskinan, tersedianya basis data kemiskinan yang beragam dari berbagai instansi ini tentu berpotensi menimbulkan persoalan lain.

Pertama, daerah akan kesulitan dalam mengintervensi program/kegiatan di lapangan. Beragamnya data yang ada membuat daerah menjadi bingung karena DTKS dirilis oleh Kementerian Sosial RI sebagai basis data intervensi kemiskinan yang terkait, seperti PKH dan beberapa jenis bansos. Terkini, dalam mengintervensi persoalan penduduk miskin ekstrim, basis data yang digunakan adalah P3KE yang disediakan oleh BKKBN. Di saat bersamaan, BPS juga sedang mengembangkan Regsosek yang ditujukan untuk mendukung intervensi pemerintah di bidang pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, hingga administrasi kependudukan. Keragaman basis data ini akan meningkatkan potensi *inclusion/exclusion errors*. "Siapa itu orang miskin" akan berbeda definisinya sehingga

salah satu basis data bisa saja mengidentifikasi penduduk A sebagai penduduk miskin, sedangkan basis data lainnya tidak.

Kedua, kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan. Selama ini, daerah mengevaluasi tingkat keefektifan dari intervensi terkait penanganan kemiskinan dengan mengacu pada metode pengukuran kemiskinan dengan pendekatan moneter yang dirilis oleh BPS. Hal ini menjadi soal karena DTKS dan P3KE mengukur kemiskinan dengan dimensi yang lebih beragam (multi dimensi) sehingga tidak parallel antara basis data kemiskinan dan data yang dievaluasi. Dalam DTKS dan P3KE, variabel yang terdapat dalam data set yang ada bukan saja meliputi tingkat pendapatan/pengeluaran, tetapi juga mencakup dimensi lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Ketiga, terjadinya inefisiensi. Basis data yang dikembangkan secara bersamaan oleh tiga instansi ini berpotensi besar menimbulkan pemborosan anggaran.

Sehubungan dengan itu, tindaklanjut kedepan yang akan dilakukan adalah pemerintah pusat akan terus didorong untuk menggunakan metode penghitungan yang seragam/paralel.

5. Mendorong Kabupaten/ Kota untuk Menyusun RPKD

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan sebuah dokumen yang memuat arah kebijakan makro penanggulangan kemiskinan pada sebuah daerah. Dokumen ini selanjutnya menjadi panduan untuk perumusan strategi dan program yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) maupun menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Kondisi terkini menunjukkan bahwa dokumen RPKD belum disusun oleh Kabupaten/Kota di provinsi NTT. Untuk itu, mendorong kabupaten/kota di provinsi NTT untuk menyusun RPKD adalah salah satu rencana tindaklanjut ke depan. Selain itu, berbagai pihak terkait juga didorong untuk memfasilitasi penyusunan RPKD Kabupaten/ Kota. Harapannya, dengan hadirnya dokumen ini, integrasi atau konvergensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di level provinsi dan Kabupaten/Kota akan semakin solid.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan Penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dokumen ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam komitmen global yang tertuang dalam Millenium Development Goal's (MDG's), serta arahan perencanaan nasional (RPJPN dan RPJMN) dan arahan perencanaan pembangunan di tingkat daerah (RPJPD dan RPJMD), dengan demikian maka Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah tertuang dalam dokumen ini perlu dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan/pelaksanaan serta pengevaluasian program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT.

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan hasil analisa pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Capaian Indikator Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT

1. RPJMD menargetkan penurunan tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi NTT tahun 2020 (18,00%); tahun 2021(17,35%); dan Tahun 2022 (16,15%). Sesuai data BPS persentase penduduk miskin di NTT tahun 2019 (20,62%), tahun 2020 (21,21%) dan tahun 2021 sebesar 20,44%, selama periode 2020-2021 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di NTT sebesar 0,77%.
2. Kondisi kemiskinan di NTT yang masih tinggi dipengaruhi oleh beberapa kondisi antara lain : Badai Seroja, fenomena pandemi Covid-19;
3. Berdasarkan data BPS pada September 2021, indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,44 dimana capaian jauh di bawah P2 nasional yakni sebesar 0,42. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) yang semakin kecil mengindikasikan kondisi yang lebih

baik dan sebaliknya, semakin besar P2 menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin yang besar..

Penjabaran 5 prioritas daerah provinsi NTT yang mendukung penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, dijabarkan dalam program-program prioritas pada RKPD 2021 sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama : Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan eradikasi stunting, dijabarkan ke dalam 10 program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah.
2. Prioritas Kedua : Peningkatan Pendapatan Masyarakat, dijabarkan ke dalam 4 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah.
3. Prioritas Ketiga : Peningkatan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan Transportasi, dijabarkan ke dalam 5 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah.
4. Prioritas Keempat : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan, dijabarkan ke dalam 5 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah.
5. Prioritas kelima : Reformasi Birokrasi, dijabarkan ke dalam 1 program dan 1 kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 Perangkat Daerah.

5.2 REKOMENDASI

1. Perlu adanya konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan PD terkait dengan rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi NTT dan nasional.
2. Perlu koordinasi intens antara TKPK dengan Perangkat Daerah terkait guna terwujudnya kolaboratif serta kesinergian aktivitas kegiatan yang lebih focus untuk optimalisasi capaian target indikator program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
3. Perlu komitmen dan kesinergian antara rencana aksi penanggulangan kemiskinan provinsi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota.
4. Penyusunan Renja PD terkait perlu memperhatikan proporsi belanja pada aktivitas kegiatan yang langsung berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan, perlu mendapat pembiayaan yang lebih dibandingkan dengan proporsi belanja untuk aktivitas kegiatan yang tidak langsung/penunjang.

5. Perlu koordinasi yang lebih intens antara TKPK nasional dan daerah guna penyelarasan data dan rencana aksi.
6. Rapat koordinasi TKPKD Provinsi NTT setidaknya dilakukan 2 kali dalam setahun.
7. TKPK Provinsi NTT perlu melakukan monitoring pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan PD terkait.
8. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh PD terkait perlu memperhatikan aspek kewenangan.
9. Perlu kesinergian dalam pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pusat, daerah maupun lembaga mitra (NGO).
10. Perlu pengalokasian sumber daya dalam membangun system pemantauan dan evaluasi pengentasan kemiskinan di NTT
11. Indikator kunci dalam melakukan monev adalah hal yang penting untuk diperhatikan